BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Penyusunan Laporan Kinerja disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

1.2 DATA UMUM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, maka Tugas dan fungsi serta Bagan Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

- **Tugas**

  Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

- **Fungsi**

  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :

  a. Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
  b. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal didaerah melalui deregulasi, pemberian intensif dan fasilitas penanaman modal;
  c. Identifikasi sumber – sumber potensial daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;

d. Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat penanaman modal;
e. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektor secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah;
f. Pengendalaian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
g. Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal perizinan dan non perizinan;
h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. merumuskan rencana umum penanaman modal Kabupaten;
b. merumuskan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
c. mengidentifikasi sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
d. mengoordinasikan kegiatan promosi penanaman modal Kabupaten;
e. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu di bidang penanaman modal dan sektoral yang menjadi kewenangan daerah;
f. melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan atas pelaksanaan penanaman modal di daerah; dan
g. mengelola sistem informasi di bidang penanaman modal, perizinan, dan non perizinan.

- **Struktur Organisasi DPMPTSP**

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

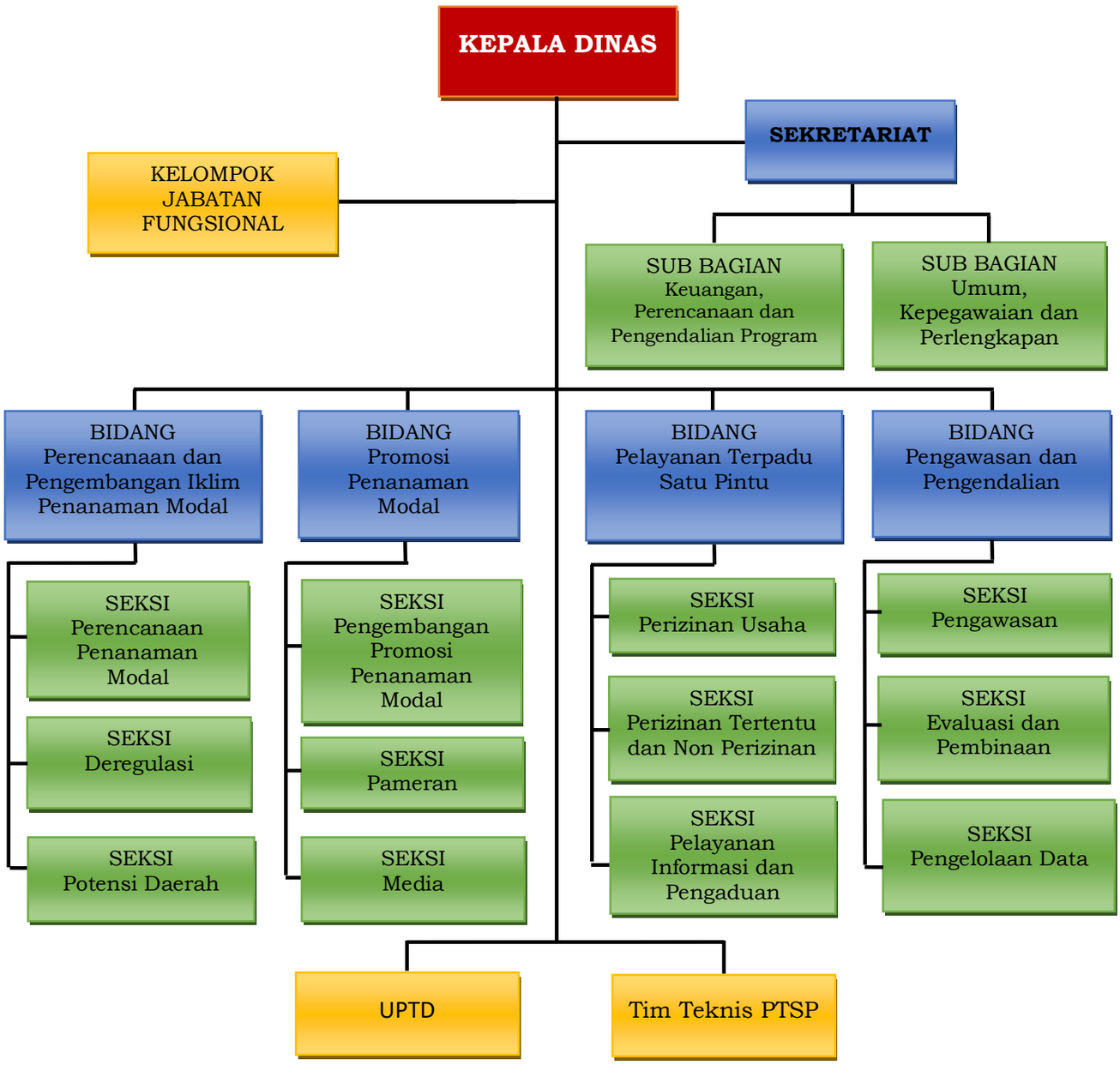

Data SDM DPMPTSP

Sumber Daya Aparatur

Rincian sumber daya aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Matrix SDM

No	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	14

Gambar 1.2 Grafik SDM

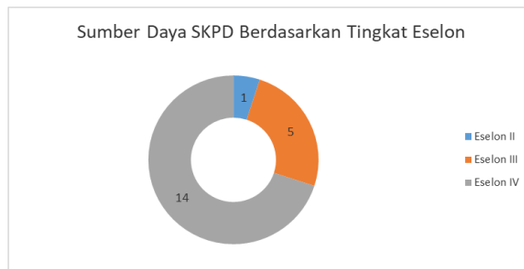

No	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMP	0
2	SMA/SMK	14
3	D III/ D IV	8
4	S1	16
5	S2	4
	Total	**42**

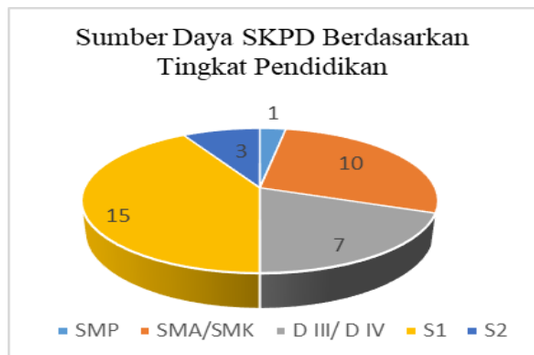

No	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Jabatan	Jumlah
1	Struktural PNS	35
2	Adinistrasi Umum PNS (Arsiparis)	1
3	THL TBPP (Tenaga Harian Lepas)	6

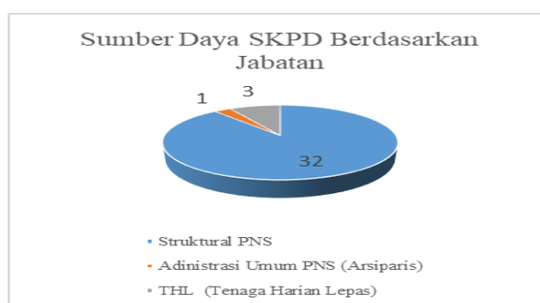

- Dari 3 gambar Grafik tersebut di atas terlihat bahwa Sumber Daya SKPD berdasarkan tingkat jabatan Eselon IVa yang paling mendominasi yaitu sebanyak 14 orang disusul jabatan eselon IIIb sebanyak 4 orang, eselon IIIa sebanyak 1 orang , dan eselon IIb sebanyak 1 orang, total Jabatan Eselon sebanyak 20 Jabatan yang sudah terisi semua.

- Grafik Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan menunjukan sebagian besar ASN di DPMPTSP berpendidikan S1 yaitu sebanyak 16 orang, yang berpendidikan SLTA

sebanyak 8 orang ASN dan 6 Pegawai Kontrak, D3 sebanyak 8 orang ASN, yang berpendidikan S2 ada 4 orang.

- Grafik Sumber Daya SKPD Berdasarkan Jabatan di atas, terlihat bahwa Mayoritas pegawai DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat masuk dalam struktural sebanyak 35 pegawai, untuk Jabatan Fungsional Arsiparis hanya 1 orang, dan ada Tenaga Harian Lepas (Kontrak) sebanyak 6 Orang yang terdiri dari 3 orang Administrasi 1 orang penjaga malam dan 2 orang sebagai Cleaning Service.

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotatawaringin Barat dilengkapi dengan sarana prasarana berupa :

1. Gedung/kantor : 1 Buah (2 lantai)
2. Kendaraan Roda Dua : 5 Buah
3. Kendaraan Roda Empat : 2 Buah
4. Peralatan Kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Server Jaringan Sistem Informasi	1 paket	Baik
2	Komputer PC	33 Buah	3 Rusak berat
3	Laptop/ Notebook	13 Buah	7 Rusak berat
4	Printer	35 Buah	5 Rusak berat
5	Modem	5 Buah	Baik
6	Wireless Access Point	1 Buah	Baik
7	Pesawat Telepon	8 Buah	1 Rusak berat
8	Faximilie	1 Buah	1 Rusak berat
9	Kamera Photo	2 Buah	1 Rusak berat
10	Proyektor / Attachment	2 Buah	Baik
11	GPS	1 Buah	Baik
12	Router	3 Buah	1 Rusak berat
13	Mesin Hitung Uang	1 Buah	Baik
14	Mesin Ketik Manual	1 Buah	1 Rusak ringan
15	Kalkulator	13 Buah	7 Rusak berat
16	Flashdisk	10 Buah	Baik
17	Mesin absensi	1 Buah	Baik

5. Perlengkapan Kantor yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
1	Lemari Besi/ rak besi	10 Buah	Baik
2	Filling Besi / Metal	13 Buah	Baik
3	Lemari Kayu	12 Buah	3 Rusak berat
4	Brankas	2 Buah	Baik
5	Meja Telepon	2 Buah	2 Rusak ringan
6	Kursi Kerja	58 Buah	Baik
7	Meja Kerja	34 Buah	8 Rusak berat
8	Lemari Buku	2 Buah	Baik
9	Kursi Tamu	1 Paket	Rusak ringan
10	Kursi Tunggu	6 Buah	2 Rusak Ringan
11	Meja Rapat	2 Buah	Baik
12	Meja Pelayanan	2 Paket	Baik
13	AC Split	16 Buah	2 Rusak Ringan
14	Televisi	5 Buah	3 Rusak berat
15	CCTV	1 Paket	Baik
16	Rak Arsip	8 Buah	Baik
17	Jam dinding	4 Buah	Baik
18	Alat ukur/ meteran	7 Buah	2 Rusak berat
19	Tangga Alumunium	1 Buah	Baik
20	Portable sound system	1 Buah	Baik
21	Kursi lipat	48 Buah	10 Rusak Ringan
22	Lemari makan	1 Buah	Rusak berat
23	Papan pengumuman	1 Buah	Baik
24	Running tex	1 Buah	Baik
25	Dispenser	3 Buah	2 Rusak berat

1.3. ASPEK STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Aspek-aspek organisasi yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Tahun 2019 dalam meningkatkan kinerja pelayanan bidang perizinan, antara lain:

1) Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, maka wewenang yang dilimpahkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, menyelenggarakan pelayanan sebanyak 125 jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan;
2) Telah ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur tentang kinerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
3) Mulai dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja;
4) Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat di dalam penyelenggaraan pelayanannya telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelayanan yang mengandalkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

1.3.1. Analissis SWOT

Strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 dapat ditentukan dengan menentukan alternatif strategi melalui analisis SWOT yaitu menelaah pada faktor internal SKPD (Kekuatan dan Kelemahan) dan faktor eksternal SKPD (Tantangan dan Peluang). Berikut analisa penentuan strategi pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP :

Tabel 1.2 Matrix Analisis SWOT

	KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
ISU STRATEGIS	Regulasi pelaksanaan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan	Sarana dan prasarana penunjang pelayanan
		Sistim Informasi Manajemen Promosi dan Pelayanan Perizinan
	Stabilitas Iklim Investasi	Tersedianya Rencanan Umum Penanaman Modal (RUPM)
		Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan BUMD
		Data potensi unggulan daerah

			Kualitas pelayanan perizinan
			Pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanaman modal
			Kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur
PELUANG (OPPORTUNITIES)			
	Perdagangan Bebas ASEAN, ACFTA dan MEA Potensi investasi pada sektor Pertambangan Potensi investasi pada sektor perikanan dan kelautan Potensi investasi sektor Pariwisata Potensi investasi sektor Perkebunan	**Alternatif Strategi 1** Mengoptimalkan pertumbuhan investasi daerah pada sektor - sektor unggulan melalui peningkatan stabilitas iklim investasi dan penerapan regulasi yang berkeadilan	**Alternatif Strategi 1** Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penerapan sistem informasi, ketercukupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan
		(I)	**(II)**
ANCAMAN (THREATHS)			
	Daya saing komoditi daerah Nilai tukar rupiah Ketersediaan listrik (Sumber energi)	**Alternatif Strategi 1** Meningkatkan iklim investasi daerah melalui ketersediaan infrastruktur, stabilitas sosial politik dan meminimalisir terjadinya inflasi	**Alternatif Strategi 1** Meningkatkan daya saing komoditi daerah melalui peningkatan, pembinaan, dan pengendalian penanaman modal serta pembinaan BUMD
		(IV)	**(III)**

Berdasarkan kajian penentuan strategi Maka dapat diketahui strategi kedepan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi SKPD adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pertumbuhan investasi daerah pada sektor - sektor unggulan melalui peningkatan stabilitas iklim investasi dan penerapan regulasi yang berkeadilan (O – S);
2. meningkatkan iklim investasi daerah melalui ketersediaan infrastruktur, stabilitas sosial politik dan meminimalisir terjadinya inflasi (S - T);
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penerapan sistem informasi, ketercukupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan (O – W);

4. Meningkatkan daya saing komoditi daerah melalui peningkatan, pembinaan, dan pengendalian penanaman modal serta pembinaan BUMD (T – W).

1.3.2. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta regional/local provinsi. Untuk isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan inetrnal dan eksternal, antara lain meliputi:

1. Perubahan Regulasi dari pusat terkait pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang melaluhi OSS dan SiCantikcloud.
2. Beberapa Perusahaan belum melaksanakan pelaporan LKPM secara tepat waktu.
3. Belum tersedianya dokumen terkait potensi dan kawasan ekonomi untuk peningkatan Investasi;
4. Kurangnya jumlah SDM dan tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja bidang Penanaman Modal dan PTSP.

1.4. PERMASALAHAN UTAMA PERANGKAT DAERAH

Program prioritas Kepala Daerah terkait Penanaman Modal :

- Pelayanan segala bentuk perizinan dengan mudah, cepat dan murah;
- Pemetaan potensi dan kawasan ekonomi untuk peningkatan Investasi;
- Promosi potensi daerah dan SDA upaya menggandeng investor;
- Pembuatan regulasi dan fasilitas yang saling menguntungkan;
- Mendorong para investor untuk menyediakan sumber energi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain:

a) Percepatan proses pelayanan perizinan sesuai dengan SOP Pelayanan yang telah ditetapkan;
b) Lemahnya pelaksanaan komunikasi, sinkronisasi dan integrasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dengan SKPD terkait;

c) Implementasi hasil penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pedoman penyelenggaraan PTSP;
d) Belum ditetapkannya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Kotawaringin Barat.
e) Pengembangan aplikasi pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan belum maksimal

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam penyampaian LKjIP berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019, tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

Bab I 1. Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Data Umum Perangkat Daerah
- 1.3 Aspek Strategis Perangkat Daerah
- 1.4 Permasalahan Utama Perangkat Daerah
- 1.5 Sistematika Penyajian

Bab II 2. Perencanaan Kinerja
- 2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 2.4 Perjanjian Kinerja (PK)

Bab III 3 Akuntabilitas Kinerja
- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran

Bab IV 4 Penutup
- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi atas permasalahan

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam mencapai tujuan, baik secara individu perorangan maupun secara kelembagaan atau organisasi. Suatu lembaga/ organisasi dalam pemerintahan, perencanaan yang matang akan berdampak pada hasil yang diinginkan dalam artian segala kegiatan akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan target kinerja yang sudah tertuang di dalam penetapan dan perjanjian kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana strategis Dinas yang kemudian disingkat dengan Renstra adalah dokumen teknis operasional yang menjadi pedoman dan penyusunan program kerja tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja sektor Dinas selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2017-2022). Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada. Fungsi dari Renstra ini sendiri adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kegiatan kerja.

A. VISI DAN MISI

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kotawaringin Barat serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat, maka ditentukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, sebagai berikut :

1. **Visi**

Pada hakekatnya visi organisasi adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, yang didalamnya terdapat karakteristik organisasi serta sejauh mana visi tersebut mengandung unsur realistis dalam pencapaiannya.

Visi adalah mental model masa depan, yang berarti visi harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh semua anggota (LAN & BPKP tahun 2002).

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kotawaringin Barat "**GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"**, Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan **Misi kesatu dan Misi ketiga**, yaitu **(Misi I) Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. (Misi III) Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup**.

2. **Misi**

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan pengertian dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan 2 (Dua) Misi Kabupaten Kotawaringin Barat yang tertuang dan tertera sebagai berikut :

- **Misi I**

  Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
- **Misi III**

  Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.

B. TUJUAN DAN SASARAN

- **Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan
2. Meningkatkan kemudahan Investasi

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2017-2022, dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Misi		Tujuan		Sasaran	
I.	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfaatan teknologi informasi Perizinan
III.	Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.	2	Meningkatkan kemudahan Investasi	2	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan tersebut berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

- **Sasaran**

Sasaran dan Target Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, dan di setiap tahun anggaran ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut setiap tahun anggaran secara rutin akan dievaluasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran strategis yang direncanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan
2. Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Indikator Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Indikator Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 Sebelum Perubahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik	Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017	87	90	95	96	99
2.	Meningkatkan Nilai Investasi yang dapat Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya pengembangan potensi daerah	Prosentase pertumbuhan nilai realisasi PMA dan PMDN	Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017					
			PMA (US $ dalam ribuan)		241.535,8				
			PMDN (Rp. Dalam Juta)		4.489.704,6				

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Indikator Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 Setelah Perubahan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TARGET INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfaatan teknologi informasi Perizinan	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017	87	90	95	96	99
2.	Meningkatkan kemudahan Investasi	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN		6.466.667 juta	6.607.640 juta	6.752.348 juta	6.900.899 juta

- **Strategi**

Strategi yang dilaksanakan dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui penerapan sistem informasi, ketercukupan sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal dan perizinan
2. Mengoptimalkan pertumbuhan investasi daerah pada sektor - sektor unggulan melalui peningkatan stabilitas iklim investasi dan penerapan regulasi yang berkeadilan

- **Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan yang dilaksanakan dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi guna peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP (perizinan dan non perizinan)
2. Meningkatkan upaya - upaya dalam terciptanya stabilitas iklim investasi
3. Memaksimalkan Promosi potensi unggulan daerah dalam menarik investor
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian penanaman modal untuk pertumbuhan investasi

2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dalam mendukung visi dan misi Bupati Kotawaringin Barat untuk mencapai target dan sasarannya DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 973/62/SK/DPMPTSP.A tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebagai berikut

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	TARGET TAHUN 2019
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfaatan teknologi informasi Perizinan	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	90

2.	Meningkatkan kemudahan Investasi	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	6.466.667 juta

2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Adapun rumusan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2019 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

NO.	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	TARGET TAHUN 2019
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemamfaatan teknologi informasi Perizinan	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 SKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang	90
2.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	6.466.667 juta

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun anggaran berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut:

Tabel 2.6
Sasaran Strategis 1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan**		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	%	90

Sebagaimana disebutkan bahwa Sasaran Strategis 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan dengan indikator Rata – rata survey

kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar **90%.**

Tabel 2.7
Sasaran Strategis 2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

Sasaran Strategis 2 **Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat**		
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. (Juta)	6.466.667 juta

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Sasaran Strategis 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan *indikator* Realisasi Investasi PMA dan PMDN yang pada Tahun Anggaran 2019 ditarget sebesar Rp. 6.466.667 juta.

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan didukung dengan program dan Kegiatan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.8
Program dan dan Kegiatan Anggaran Tahun 2019

No.	**Kode Rekening**	**Program / Kegiatan**	**Indikator Program/ Kegiatan**	**Anggaran Murni**	**Anggaran Perubahan**	**Target**
1	**2**	**3**		**4**		**5**
I	**2.12.2.12.01.01**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**902.676.050,00**	**965.767.910,00**	**100 %**
1	2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.000.000,00	155.400.000,00	12 Bulan
2	2.12.2.12.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	3.700.000,00	2.690.000,00	7 Unit
3	2.12.2.12.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	171.008.730,00	164.558.790,00	12 Bulan
4	2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	74.504.900,00	74.504.900,00	12 Bulan
5	2.12.2.12.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki	28.040.000,00	28.040.000,00	39 Unit
6	2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	52.313.170,00	52.313.170,00	35 Jenis
7	2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	34.675.800,00	16.050.000,00	3 Jenis
8	2.12.2.12.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5.250.000,00	5.250.000,00	6 Jenis

9	2.12.2.12.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	145.955.050,00	152.262.550,00	41 Unit
10	2.12.2.12.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	700.000,00	0,00	
11	2.12.2.12.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	13.950.000,00	19.462.500,00	456 Orang
12	2.12.2.12.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah orang makanan dan minuman	216.578.400,00	295.236.000,00	26 Kali
II	**2.12.2.12.01.02**	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana**	**397.006.100,00**	**371.610.755,00**	**100 %**
13	2.12.2.12.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	206.753.100,00	0,00	
14	2.12.2.12.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	31.653.000,00	25.502.000,00	15 Buah
15	2.12.2.12.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	80.000.000,00	80.000.000,00	1 Unit
16	2.12.2.12.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/ berkala	72.500.000,00	53.250.000,00	7 Unit
17	2.12.2.12.01.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	6.100.000,00	6.100.000,00	10 Unit
18	2.12.2.12.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket dalam rehab gedung kantor	0,00	206.758.755,00	1 Unit per Tahun
III	**2.12.2.12.01.03**	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur**	**47.250.000,00**	**52.250.000,00**	**100 %**
19	2.12.2.12.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	47.250.000,00	52.250.000,00	78 Stel
IV	**2.12.2.12.01.05**	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**198.820.000,00**	**225.820.000,00**	**100 %**
20	2.12.2.12.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	198.820.000,00	225.820.000,00	28 Orang Kali
V	**2.12.2.12.01.06**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**46.083.900,00**	**32.738.600,00**	**100 %**
21	2.12.2.12.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	285.000,00	285.000,00	10 Laporan
22	2.12.2.12.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	285.000,00	285.000,00	10 Laporan
23	2.12.2.12.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	45.513.900,00	32.168.600,00	10 Laporan

VI	**2.12.2.12.01.15**	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat**	**503.868.900,00**	**492.313.685,00**	**80 %**
24	2.12.2.12.01.15.01	Penyusunan bahan media informasi Penanaman Modal	Jumlah jenis media promosi yang disediakan	96.665.000,00	96.665.000,00	5 Jenis
25	2.12.2.12.01.15.02	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran tingkat daerah dan tingkat nasional yang diikuti	346.203.900,00	256.858.900,00	3 Kali
26	2.12.2.12.01.15.03	Pengelolaan Aplikasi dan publikasi informasi Promosi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan		138.789.785,00	1 Aplikasi
			Jumlah jenis publikasi informasi DPMPTSP	61.000.000,00	138.789.785,00	3 Jenis
VII	**2.12.2.12.01.16**	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**Peningkatan Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah**	**268.889.100,00**	**318.889.100,00**	**80 %**
27	2.12.2.12.01.16.01	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	Jumlah Dokumen data potensi penanaman modal di daerah	4.749.000,00	4.749.000,00	1 Dok
28	2.12.2.12.01.16.02	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah dokumen pemetaan peluang penanaman modal daerah yang terdokumentasi ke dalam sistim informasi peluang investasi daerah	102.890.100,00	102.890.100,00	1 Dok
29	2.12.2.12.01.16.03	Kajian kebijakan Penanaman Modal dan pemberian insentiv investasi	Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP	161.250.000,00	161.250.000,00	3 Dok
	2.12.2.12.01.16.10	Pembinaan dan pengembangan BUMD	Jumlah BUMD yang dibina	0,00	50.000.000,00	3 Perusda
VIII	**2.12.2.12.01.17**	**Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan**	**Prosentase Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat disetujui**	**186.572.750,00**	**141.776.750,00**	**98 %**
30	2.12.2.12.01.17.01	Peningkatan pelayanan periznan usaha	Jumlah perizinan usaha yang dapat disetujui melalui OSS dan Non OSS	54.150.000,00	45.150.000,00	1.250 Buah
31	2.12.2.12.01.17.02	Peningkatan pelayanan perizinan tertentu dan non perizinan	Jumlah perizinan tertentu dan non perizinan yang dapat disetujui melalui OSS (*Online Single Submission)* dan Non OSS	71.399.500,00	52.505.000,00	1.250 Buah
32	2.12.2.12.01.17.03	Pelayanan informasi dan pengaduan perizinan	Terlaksananya survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	61.023.250,00	44.121.750,00	2 Kali
			Jumlah Pengaduan yang ditangani			2 Buah
IX	**2.12.2.12.01.18**	**Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal**	**Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu**	**52.185.200,00**	**52.185.200,00**	**60 %**
33	2.12.2.12.01.18.01	Pengumpulan dan Pengolahan data	Jumlah laporan data PMA/PMDN perizinan dan non perizinan	9.790.100,00	9.790.100,00	1 Dok

34	2.12.2.12.01.18.02	Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	25.515.000,00	25.515.000,00	50 OK
35	2.12.2.12.01.18.03	Pemantauan, pengawasan penanaman modal dan perizinan	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, penanaman modal dan perizinan	16.880.100,00	16.880.100,00	150 Perusahaan

III
AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengetahui dan mempermudah interprestasi atas pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja sasaran digunakan Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017-2022. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Misi dan Visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat).

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menggambarkan Tingkat Pencapaian Sasaran, Indikator Sasaran serta Tingkat Pencapaian masing-masing Program dan Kegiatan. Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat juga menginformasikan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

Secara umum berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Capaian Indikator Sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019

No.	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan	99,90	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	93,99	Sangat Tinggi

Penjelasan dari tabel di atas, diketahui bahwa pada misi ke 1 yaitu Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan dengan terdapat 1 sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan yang Indikator Kinerja Sasaran 1 yaitu Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan dengan capaian Indikator Sasaran Sangat tinggi.

Sedangkan pada Misi 3 yaitu Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup dengan terdapat 1 sasaran strategis yaitu 1) Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Realisasi Investasi PMA dan PMDN dengan capaian Indikator Kinerja Sasaran Sangat Baik.

3.1.1. Perbandingan antara Realisasi dan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

Perbandingan antara Realisasi dan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2019, adalah dengan cara membandingkan antara target dan

realisasi pada indikator Kinerja Utama. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan antara realisasi dan target kinerja Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat

Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan**					
Indikator Kinerja	**Satuan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian** (dengan rumus $\frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target}}$ **X 100 %**	**Keterangan**
Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	%	90	89,91	99,90	Sangat tinggi
Capaian Kinerja Sasaran				**99,90**	
Sasaran Strategis 2 **Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat**					
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. (juta)	6.466.667 Juta	6.078.333 Juta	93,99	Sangat tinggi
Capaian Kinerja Sasaran				**93,99**	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 yakni ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan*** dengan indikator Kinerja ***Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan*** yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019 sebesar ***99,90 %*** atau ***Sangat Tinggi***, demikian pula dengan sasaran strategis 2 yakni ***Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat*** dengan Indikator Kinerja ***Realisasi Investasi PMA dan PMDN*** yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2019 sebesar **93,99 %** dengan kategori Skala Nilai Peringkat Kinerja **Sangat Tinggi.**

Tabel 3.4

Realisasi anggaran yang menunjang Indikator Kinerja Utama

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat

Indikator Kinerja	**Program**	**Pagu Anggaran**	**Realisasi Anggaran**	**Capaian** (dengan rumus $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu anggaran}}$ X 100 %
Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan	Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan	141.776.750	105.356.000	74,31
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	492.313.685	484.472.594	98,41
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	318.889.100	266.647.100	83,62
	Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	52.185.200	51.185.200	98,08
Capaian Kinerja Keuangan		**1.005.164.735**	**907.660.894**	**90,30 %**

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian IKU DPMPTSP Tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi anggaran untuk Indikator Kinerja Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan diampuh oleh 1 Program yaitu Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan pagu anggaran Rp. 141.776.750,00 dan terealisasi sebesar Rp. 105.356.000,00 atau sebesar 74,31 %, sedang realisasi fisik sebesar 100,00%, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan perizinan usaha dengan pagu anggaran sebesar Rp. 45.150.000,- dan terealisasi Rp. 23.100.000,- atau 51,16% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.
b. Peningkatan pelayanan perizinan tertentu dan non perizinan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.505.000,- dan terealisasi Rp. 38.755.000,- atau 73,81% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

c. Peningkatan Pelayanan informasi dan pengaduan perizinan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.121.750,- dan terealisasi Rp. 43.501.000,- atau 98,59% dengan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Realisasi Investasi PMA dan PMDN diampuh oleh 3 Program yaitu :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi pagu anggaran Rp. 492.313.685,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 484.472.594,00 atau sebesar 98,41 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%, dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyusunan bahan media informasi Penanaman Modal, pagu anggaran Rp. 99.665.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 96.635.000,- atau sebesar 99,97% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
   b. Penyelenggaraan pameran investasi, pagu anggaran Rp. 256.858.900,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 249.837.594,- atau sebesar 97,27% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.
   c. Pengelolaan Aplikasi dan publikasi informasi Promosi, pagu anggaran Rp. 138.789.785,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.000.000,- atau sebesar 99,43% dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi pagu anggaran Rp. 318.889.100,00 realisasi anggaran Rp. 266.647.100,00 atau sebesar 83,62 % dan realisasi fisik sebesar 90,59% dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal, pagu anggaran Rp. 4.749.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.749.000,- atau sebesar 100,00 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%
   b. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah, pagu anggaran Rp. 102.890.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.623.100,00 atau sebesar 99,74 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%
   c. Kajian kebijakan Penanaman Modal dan pemberian insentiv investasi, pagu anggaran Rp. 161.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 159.275.000,- atau sebesar 98,78 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%
   d. Pembinaan dan pengembangan BUMD, pagu anggaran Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 (kegiatan tidak dilaksanakan)

3. Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal dengan pagu anggaran Rp. 52.185.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.185.200,00 atau sebesar 98,08 % dan realisasi fisik sebesar 100,00% dengan kegiatan sebagai berikut :
   a. Pengumpulan dan Pengolahan data, pagu anggaran Rp. 9.790.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.790.100,- atau sebesar 100,00 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%
   b. Pembinaan Penanaman Modal, pagu anggaran Rp. 25.515.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.515.000,- atau sebesar 96,08 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%
   c. Pemantauan, pengawasan penanaman modal dan perizinan, pagu anggaran Rp. 16.880.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.880.100,- atau sebesar 100,00 % dan realisasi fisik sebesar 100,00%

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan.

- Diterapkan sistim baru pelayanan perizinan melaluhi Online Single Submission (OSS) yang berdampak pada pelayanan terhadap pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.
- Pelaporan LKPM yang belum tepat waktu sehingga data yang terekap untuk realiasai investasi bisa berubah.

Soslusi

- Meningkatkan kwalitas SDM dengan menyertakan ASN Pelayanan Publik untuk mengikuti kegiatan, Bimtek, Diklat ataupun Magang teknis terkait dengan sistim aplikasi baru yang diterapkan oleh BKPM RI.
- Meningkatkan Promosi Peluang Investasi, sosialisasi dan pembinaan terhadap Perusahaan/ Investor.
- Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Membuat regulasi yang memudahkan bagi Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Pencapaian indikator sasaran oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2019 jika dibanding dengan Tahun Anggaran 2018 sedikit menurun tapi jika di bandingkan dengan tahun 2017 sedikit lebih baik,

Tabel 3.5

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017,2018 dan tahun 2019

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja			Ket
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1.	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik (Survey IKM)	Mutu : B Kenierja : (Baik) Rentang Capaian : 70 – 84	91		B (Baik)	104,59		Sebelum Perubahan Indikator
	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan			89,91			99,90	Setelah Perubahan Indikator
2.	- Persentase pertumbuhan nilai realisasi Investasi PMA - PMA (US $ dalam ribuan) - PMDN (Rp. Dalam Juta)	44.893,80 265.396,30	145.312,3 8.739.363,2					Sebelum Perubahan Indikator
	- Realisasi Investasi PMA dan PMDN			6.078.333 Juta			93,99	Setelah Perubahan Indikator

Data yang diperbandingkan adalah dimulai dari tahun 2017 karena tahun 2017 adalah tahun dimulainya perencanaan strategis (Renstra) DPMPTSP Tahun 2017-2022. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 yakni **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan** dengan **indikator Kinerja Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan** yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2017 realisasi kinerja kategori B dengan rentang capaian 70-84, pada tahun tersebut DPMPTSP dalam melaksanakan Survey belum berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 dan tahun 2019 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017. Realisasi Kinerja Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik (Survey IKM) Tahun Anggaran 2018 realisasi Kinerja sebesar 91 dengan capaian Kinerja sebesar 104,59% sedang pada tahun anggaran 2019 realisasi Kinerja sebesar 89,91 dengn capaian Kinerja sebesar **99,90%** atau **Sangat Tinngi**.

Sedangkan capaian sasaran strategis 2 yakni ***Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat*** dengan Indikator Kinerja ***Realisasi Investasi PMA dan PMDN*** yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2019 Realisasi Kinerja sebesar Rp. 6.078.333 juta dengan capaian Kinerja sebesar **93,99 %** dengan kategori Skala Nilai Peringkat Kinerja **Sangat Tinggi.**

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis DPMPTSP seperti pada tabel berikut

Tabel 3.6

Perbandingan realisasi kinerja Sampai Tahun ini dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan Strategis DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Ket
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1.	- Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik (Survey IKM)	85	87		Mutu : B Kenierja : (Baik) Rentang Capaian : 70 – 84	91		Sebelum Perubahan Indikator
	- Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non perizinan			90			89,91	Setelah Perubahan Indikator
2.	- Persentase pertumbuhan nilai realisasi Investasi PMA - PMA (US $ dalam ribuan) - PMDN (Rp. Dalam Juta)	 219.578,00 4.081.549,70	 241.535,8 4.489.704,6		 44.893,80 265.396,30	 145.312,3 8.739.363,2		Sebelum Perubahan Indikator
	- Realisasi Investasi PMA dan PMDN			6.466.667 Juta			6.078.333 Juta	Setelah Perubahan Indikator

Survey IKM DPMPTSP dilaksanakan berdasakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

SKM dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu semester I yang dimulai di bulan April s.d Juli 2019, sedang Semester II dilaksanakan pada bulan September s.d Desember 2019 dengan realisasai Kinerja 89,91 dari target kinerja 91 , SKM ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan *skala likert*. Responden adalah pelaku usaha dan masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. Kuesioner SKM diberi untuk diisi oleh responden dengan teknik responden mengisi sendiri kuesioner kertas (lembar SKM) yang diterima dan langsung dikumpulkan kepada petugas di bagian informasi di front office. Penentuan responden dilakukan oleh Kepala Bidang PTSP, Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dan menyebarkan kuesioner SKM kepada *customer* yang telah mendapatkan layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sampai mencapai 100 responden.

Formulasi perhitungan/ rumus yang di gunakan untuk mendapatkan nilai SKP seperti pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dalam pelaksanaan SKM Unsur pelayanan dari pernyataan yang diberikan oleh responden ada 9 unsur sebagai berikut:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Adapun capaian sasaran strategis 2 yakni ***Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat*** dengan Indikator Kinerja ***Realisasi Investasi PMA dan PMDN*** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 6.078.333 Juta dari target Rp. 6.466.667 Juta.

Formulasi perhitungan realisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Untuk Prosentase pertumbuhan nilai realisasi Investasi PMA tahun 2018 terealisasi sebesar US $. 145.312,3 (dalam ribuan) ada kenaikan 223,68 % dari tahun 2017 yang terealisasi hanya sebesar US $. 44.893,80. Sedangkan untuk nilai realisasi Investasi PMDN tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 8.739.363,2 (Rp. Dalam Juta) ada kenaikan 3.192,95% dari tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp. 265.396,30 (Rp. Dalam Juta)
2. Untuk tahun 2019 nilai realisasi Investasi PMA dan PMDN sebesar sebesar Rp. 6.078.333 Juta dari target Rp. 6.466.667 Juta dengan capaian sebesar 93,99 %

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan.

- Diterapkan sistim baru pelayanan perizinan melaluhi Online Single Submission (OSS) yang berdampak pada pelayanan terhadap pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.
- Pelaporan LKPM yang belum tepat waktu sehingga data yang terekap untuk realiasai investasi bisa berubah.

Soslusi

- Meningkatkan kwalitas SDM dengan menyertakan ASN Pelayanan Publik untuk mengikuti kegiatan, Bimtek, Diklat ataupun Magang teknis terkait dengan sistim aplikasi baru yang diterapkan oleh BKPM RI.
- Meningkatkan Promosi Peluang Investasi, sosialisasi dan pembinaan terhadap Perusahaan/ Investor.
- Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Membuat regulasi yang memudahkan bagi Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Memberikan Fasilitas Loket layanan pendampingan dan layanan mandiri dalam pelaksanaan Permohonan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) bagi Masyarakat ataupun Pelaku Usaha di Daerah;

3.2. Realisasi Anggaran

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang diinginkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat di tahun 2019 mendapatkan pagu anggaran untuk jumlah Belanja Tidak Langsung sebelum

perubahan sebesar **Rp. 4.519.334.000,00** setelah perubahan menjadi **Rp. 5.269.486.000,00** dan Belanja Langsung sebelum perubahan **Rp. 2.603.352.000,00** dan setelah perubahan menjadi sebesar **Rp. 2.653.352.000,00**. Data Anggaran dan Realisasi DPPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2019

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Lebih/ (Kurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**6.719.625.500,00**	**1.273.156.125,52**	**(5.446.469.374,48)**	**18,95**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**6.719.625.500,00**	**1.273.156.125,52**	**(5.446.469.374,48)**	**18,95**
4.1.2	Retribusi Daerah	6.698.755.500,00	1.248.703.187,00	(5.446.469.374,48)	**18,64**
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.870.000,00	24.452.938,52	3.582.938,52	117,17
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**6.719.625.500,00**	**1.273.156.125,52**	**(5.446.469.374,48)**	**18,94**
5	**BELANJA**	**7.922.838.000,00**	**7.349.617.183,00**	**(573.220.817,00)**	**92,76**
5.1	**Belanja Tidak Langsung**	**5.269.486.000,00**	**4.887.088.124,00**	**(382.397.876,00)**	**92,74**
5.1.1	Belanja Pegawai	5.269.486.000,00	4.887.088.124,00	(382.397.876,00)	**92,74**
5.2	**Belanja Langsung**	**2.653.352.000,00**	**2.462.529.059,00**	(190.822.941,00)	**92,81**
5.2.1	Belanja Pegawai	215.868.060,00	204.823.493,00	(11.044.567,00)	94,88
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.951.170.850,00	1.780.684.516,00	(170.486.334,00)	91,26
5.2.3	Belanja Modal	486.313.090,00	477.021.050,00	(9.292.040,00)	98,09
JUMLAH BELANJA		**7.922.838.000,00**	**7.349.617.183,00**	**(573.220.817,00)**	**92,76**
SURPLUS/(DEFISIT)		**(1.203.212.500,00)**	**(6.076.461.057,48)**	**(4.873.248.557,48)**	**505,02**

Sumber : SAPBD dpkd.kotawaringinbaratkab.go.id/simkada_2019

Dari data diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada anggaran perubahan telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **Rp. 7.922.838.000,00** dengan realisasi penyerapan sebesar **Rp. 7.349.617.183,00** atau capaian kinerja keuangan **92,76 %.**

Berdasarkan Pengesahan DPA–SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor : 900/13/II/DPA-SKPD/2019 tanggal 10 Januari 2019 alokasi Dana Anggaran untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 7.122.686.000,00 dan dalam Pengesahan DPPA – SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor : 910/16/II/DPPA-SKPD/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dengan mengelola alokasi dana anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 7.922.838.000,00 anggaran tersebut sampai akhir Desember 2019 telah terealisasi sebesar Rp. 7.349.617.183,00 dengan saldo keuangan sebesar Rp. 573.220.817,00 telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk informasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisai Pendapatan Retribusi
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019

NO	RETIBUSI	REALISASI 2017	REALISASI 2018	TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	%
1	*2*			*3*	*4*	*5*
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1.011.256.100	1.345.345.935	6.698.755.500	1.248.703.187	18,64
2	Izin Gangguan (HO)	1.790.158.325				
3	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	14.681.748	55.405.836	20.870.000	24.452.938,52	117,17
	JUMLAH	**2.816.096.173**	**1.400.751.771,50**	**6.719.625.500**	**1.273.156.125,52**	**18,95**

Sumber : Bidang PTSP DPMPTSP

Pada tahun 2017 Realisasi PAD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 2.816.096.173,- sedangkan pada tahun 2018 ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi IMB sebesar Rp. 1.345.345.935,- Serta Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp. 55.405.836,- dan Pada tahun anggaran 2019 DPMPTSP memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi IMB sebesar Rp. 1.248.703.187,- dari targetnya Rp. 6.698.755.500 serta Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp. 24.452.938,52 dari targetnya yaitu Rp. 20.870.000,- dengan demikian total PAD retribusinya sebesar Rp. 1.273.156.125,52 dari target PAD sebesar Rp. 6.719.625.500,-

Realisasi PAD tahun 2017 lebih besar dari tahun 2018 dan tahun 2019 hal ini dikarenakan pada tahun 2018 dan tahun 2019 sudah tidak ada lagi retribusi untuk Izin Gangguan (HO) sehingga susah sekali untuk memenuhi target PAD yang hanya bisa di pungut dari Retribusi IMB.

Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat telah menerima Penghargaan dari Kemenpan RB berupa sertifikat hasil Evaluasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik **Kategori Cukup** sehingga untuk tahun berikutnya diharapkan evaluasi dari Kemenpan RB bisa meningkat seiring dengan usaha DPMPTSP yang segera memenuhi kekurangan/ kelemahan yang ada pada tahun 2019.

Penghargaan juga diterima dari Ombudsman berupa Ringkasan Eksekutif Hasil Kepatuhan 2019, DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat masuk zona hijau peringkat 69 (80,65)

Alokasi anggaran Belanja Langsung (BL) urusan Penanaman Modal khususnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019 sebesar Rp. 1.005.164.735,- dengan realisasi mencapai Rp. 907.660.894,- atau 90,30 %, realisasi fisik sebesar 97,02%.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kotawaringin Barat tahun 2019 adalah:

1. **Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi** didukung oleh 3 kegiatan sebagai berikut :
   a. Kegiatan Penyusunan Bahan Media Informasi Penanaman Modal Terdapat beberapa pekerjaan yang dilaksanakan pada kegiatan ini yaitu :
      - Penyediaan souvenir dan belanja cetak bahan promosi untuk keperluan kegiatan pameran penanaman modal di luar daerah dan bahan informasi di kantor DPMPTSP. Bahan promosi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan potensi daerah dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tentunya bukan hal yang mudah untuk menarik minat para pengunjung pameran untuk datang ke stand, oleh karena itu untuk mendukung agar pameran penanaman modal tersebut agar semakin menarik untuk dikunjungi maka disediakanlah penyediaan souvenir tersebut. Pengunjung yang datang kemudian diarahkan oleh petugas yang telah siap dengan bahan cetak promosi terkait potensi daerah dan peluang investasi dan siap untuk memberikan penjelasan tentang peluang dan potensi investasi yang ada di Kotawaringin Barat. Harapannya pengunjung berminat untuk melakukan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.
      - Tersedianya media sosial untuk kepentingan promosi penanaman modal. Untuk kegiatan ini Seksi Media bertanggung jawab dan berkewajiban untuk selalu memantau isu-isu

terkait penanaman modal kemudian menggunakan media yang ada untuk memberikan informasi perkembangan penanaman modal. Selain itu media sosial juga digunakan untuk memperkenalkan potensi daerah dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Pagu anggaran untuk mendukung kegiatan ini adalah Rp. 96.665.000 dengan realisasi Rp.96.665.000 atau 100% dengan realisasi fisik adalah 100%.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Terdapat beberapa pameran yang telah diikuti oleh Seksi Pameran yaitu:

- Pameran APKASI dan Expo Kobar Tahun 2019 adalah pertama kalinya Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berpartisipasi pada pameran APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) Dengan keikutsertaan tersebut diharapkan mampu menjaring minat para penanam modal untuk berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Ada beberapa investor yang berminat dengan produk unggulan daerah dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, namun belum bisa dilanjutkan pada tahap kerjasama karena masih belum maksimalnya penyajian data peluang invetasi yang ada. Pada kegiatan Expo Kobar disajikan juga materi promosi penanaman modal berupa produk, peluang dan perkembangan investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat serta informasi terkait perizinan dan penanaman modal.
- Pagu anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan pameran investasi adalah Rp. 256.858.900,- dengan realisasi Rp. 249.241.594,- atau 97,03%. Realisasi fisik untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi adalah 100%.

c. Kegiatan Pengelolaan Aplikasi dan Publikasi Informasi Promosi

Terdapat beberapa pekerjaan pada kegiatan ini yaitu :

- Dilaksanakannya pengisian berita/iklan promosi penanaman modal melalui media elektronik yaitu melalui radio dan stasiun televisi lokal. Berita/iklan tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait persyaratan dan kemudahan dalam perizinan usaha di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Dilaksanakannya pengembangan aplikasi perizinan DPMPTSP. Aplikasi perizinan mandiri yang telah diselenggarakan selama ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha memproses pendaftaran izin secara online. Pada tahun 2019 aplikasi tersebut dikembangkan kualitasnya dengan menggunakan tanda tangan elektronik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kecepatan proses perizinan dan semakin transparan. Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 138.789.785 dan terealisasi Rp. 138.000.000 atau 99,43% dengan realisasi fisik 100%.

2. **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi dengan indikatornya adalah Peningkatan Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah. Pagu Anggaran Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi sebesar Rp. 318.889.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 266.647.100,- atau 90.59 % dengan realisasi fisik 83,62 %. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal
b. Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah
c. Kajian Kebijakan Penanaman Modal dan Pemberian Insentif Investasi dengan Output Produk hukum DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 sebagai berikut :
   - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Tempat Usaha, telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pengantar Surat Kepala DPMPTSP Nomor : 503/553/DPMPTSP.B tanggal 06 Agustus 2019.
   - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi, telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pengantar Surat Kepala DPMPTSP Nomor : 800/662/DPMPTSP.B tanggal 15 Oktober 2019.
   - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pengantar Surat Kepala DPMPTSP Nomor : 800/672/DPMPTSP.B tanggal 21 Oktober 2019.
   - Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pengantar Surat Kepala DPMPTSP Nomor : 800/762/DPMPTSP.B tanggal 20 Desember 2019.
   - Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 – 2025, telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pengantar Surat Kepala DPMPTSP Nomor : 800/763/DPMPTSP.B tanggal 20 Desember 2019.
   - Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

- *Perjanjian Kerja Sama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan* ***Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Sampit*** *Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Di Daerah Melalui Mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 01/KTR/VIII-07/0119 dan Nomor : 553/46/DPMPTSP.B.*
- *Perjanjian Kerja Sama Antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pangkalan Bun Dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tentang Peningkatan Kepesertaan Program Bpjs Ketenagakerjaan Nomor : PKS/36/092019. dan Nomor : 553/53/DPMPTSP.B.*

d. Pembinaan dan Pengembangan BUMD Kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dikarenakan ada kesalahan dalang penempatan kode rekening sub kegiatan.

3. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Berdasarkan Tabel 4.25, Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan salah satu program pendukung dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan sasaran tercapainya Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Indikator Kinerja yaitu Prosentase Dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang dapat disetujui. Prosentase yang dicapai dari Program tersebut dari segi realisasi anggaran hanya 74,31% dan capaian outcame / output adalah 89,72% dari Target 98%.

Salah satu penyebab rendahnya capaian adalah diakibatkan oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah, maka Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), tidak lagi diterbitkan dan dipersyaratkan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk mencapai sasarannya didukung melalui beberapa Kegiatan sebagai
berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah Perizinan Usaha yang dapat disetujui melalui Online Single Submission (OSS) dan Non Online Single Submission (OSS). Pada Tabel 4.25, dapat dijelaskan bahwa outcame / output capaiannya sebesar 86,08% dengan jumlah 1.076 Buah Dokumen Perizinan Usaha yang diterbitkan. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mendukung kegiatan tersebut yaitu :

1. Memberikan Fasilitas Loket layanan pendampingan dan layanan mandiri dalam pelaksanaan Permohonan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) bagi Masyarakat ataupun Pelaku Usaha di Daerah; *(terlampir Dokumentasi)*
2. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis PTSP dari Dinas Teknis terkait dalam hal penyesuaian Satandar Operasional Prosedur terutama melalui Online Single Submission (OSS). *(terlampir Dokumentasi)*

b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah Perizinan Tertentu dan Non Perizinan yang dapat disetujui melalui Online Single Submission (OSS) dan Non Online Single Submission (OSS). Pada Tabel 4.25, dapat dijelaskan bahwa outcame / output capaiannya sebesar 53,60% dengan jumlah 670 Buah Dokumen Perizinan Tertentu dan Non Perizinan yang diterbitkan. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mendukung kegiatan tersebut yaitu :

1. Memberikan layanan Perizinan melalui Aplikasi Online untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh legalitas perizinan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
2. Melaksanakan Penagihan terhadap Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah didampingi oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SatpoPP), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tertib mengurus IMB. *(terlampir Dokumentasi)*

c. Kegiatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan

Kegiatan ini mencakup Indikator Kinerja yaitu dengan terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan ditanganinya jumlah pengaduan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dicapai melalui langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melakukan Penyebaran Kuisioner kepada Masyarakat atau Pelaku Usaha terkait proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 2 (dua) Kali pelaksanaan, untuk mengukur SKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Memberikan penanganan pangaduan secara cepat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan, baik melalui Website Aplikasi Perizinan Online, Email, Telp/sms, Kotak Saran/Pengaduan dan Formulir atau Surat tertulis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, juga melakukan beberapa perbaikan guna mendukung Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Peningkatan Standar Pelayanan dari segi Sarana, Prasarana dan

atau fasilitas, peralatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayananan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan, sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga Pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi Pmberantasan Korupsi (KPK) serta Ombudsman RI. Pada Tahun 2019, Ruang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan perubahan desain dengan penambahan beberapa fasilitas sebagai berikut :

1. Terdapat Penyekatan antara Front Office (FO) dan Back Office (BO) dalam proses pelayanan perizinan;
2. Terdapat Loket Informasi dan Loket Layanan Perizinan;
3. Terdapat Ruang Tunggu yang dilengkapi dengan AC, TV serta Papan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang memudahkan Masyarakat dan pelaku usaha memperoleh informasi;
4. Terdapat Ruang ibu menyusui / Laktasi;
5. Terdapat Ruang Bermain Anak;
6. Terdapat Fasilitas jalan bagi disabilitas.

Proses Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 adalah berdasarkan Data Jumlah Permohonan Perizinan dan Non Perizinan yang teregistrasi sebanyak 1.946 Permohonan, Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 1.746 Dokumen, Jumlah Perizinan dan Non Perizinan dalam Proses sebanyak 66 Permohonan, serta Perizinan dan Non Perizinan yang tidak dapat diproses sebanyak 134 Permohonan. Perizinan yang tidak dapat diproses tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Berkas Permohonan tidak lengkap secara syarat admnistrasi maupun teknis, adanya perubahan peraturan
2. Berkas Permohonan Tidak sesuai dengan kondisi maupun fakta pemeriksaan lapangan;
3. Adanya peraturan terbaru dari Pemerintah Pusat terkait Pencabutan maupun penghapusan Perizinan dan Non Perizinan;
4. Adanya Perizinan dan Non Perizinan yang telah terbit akan tetapi sudah tidak sesuai dan mengalami perubahan sehingga perlu dicabut, seperti Izin Praktek Tenaga Kesehatan.

4. Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya perkembangan potensi daerah. Indikator adalah persentase jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu. Realisasi investasi PMA dan PMDN sebesar Rp. 6.078.333.064.456,00 dengan rincian untuk realisasi investasi PMA sebesar Rp. 1.942.478.326.862,00 dan PMDN sebesar Rp. 4.135.854.737.594,00. Pagu Anggaran

Program Pengawasan dan Pengendalian sebesar Rp. 52.185.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 51.185.200,00 atau 98.08 % dengan realisasi fisik 100 %. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Program Pengawasan dan Pengendalian adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data dengan Sasaran Kegiatan adalah tersedianya data PMA dan PMDN, Perizinan dan Nonperizinan. Indikator adalah jumlah laporan data PMA dan PMDN, Perizinan dan Non Perizinan (1 Dokumen). Sumber Data dari LKPM Online, Siup dan UMKM. Pagu Anggaran yang tersedia Rp. 9.790.100,00 dan terealisasi Rp. 9.790.100,00 atau 100 % dengan realisasi fisik 100 %.
b. Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal dengan Sasaran Kegiatan adalah Perusahaan PMA dan PMDN. Indikator adalah jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pelaksanaan penanaman modal melalui Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online dan Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang. Pagu Anggaran tersedia Rp. 25.515.000,00 dan terealisasi Rp. 24.515.000,00 atau 96,08 % dengan realisasi fisik 100 %. Untuk Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.000.000,00 atau 3.92 % pada rekening belanja sewa gedung, dikarenakan untuk fasilitas gedung pemerintah daerah tidak dikenakan biaya atau sewa.
c. Kegiatan Pemantauan, Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan Sasaran Kegiatan terlaksananya pemantauan, pengawasan penanaman modal dan perizinan. Indikator adalah jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, pengawasan penanaman modal dan perizinan dengan target 150 perusahaan. Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemantauan pada Tahun 2019 adalah sebanyak 203 Perusahaan/Pelaku Usaha. Pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 16.880.100,00 dan terealisasi Rp. 16.880.100,00 atau 100 % dengan realisasi fisik 100 %. Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemantauan pada Tahun 2019 adalah sebanyak 203 Perusahaan/Pelaku Usaha.

Untuk informasi Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
TOTAL PAGU ANGGARAN DPMPTSP		2.653.352.000,00	2.462.693.059,00	92,81	
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	965.767.910,00	898.132.875,00	93,00	100,00

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	155.400.000,00	110.860.498,00	71,34	100,00
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional	2.690.000,00	2.660.500,00	98,90	100,00
	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	164.558.790,00	149.223.835,00	90,68	100,00
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	74.504.900,00	74.387.127,00	99,84	100,00
	5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	28.040.000,00	28.040.000,00	100,00	100,00
	6. Penyediaan alat tulis kantor	52.313.170,00	52.133.170,00	99,66	100,00
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.050.000,00	16.050.000,00	100,00	100,00
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	100,00
	9. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.262.550,00	152.262.550,00	100,00	100,00
	10. Penyediaan makanan dan minuman	19.462.500,00	15.427.500,00	79,27	100,00
	11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	295.236.000,00	291.837.695,00	98,85	100,00
II.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**371.610.755,00**	**358.329.623,00**	**96,43**	**98,25**
	1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	25.502.000,00	18.000.300,00	70,58	74,51
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	80.000.000,00	79.416.600,00	99,27	100,00
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	53.250.000,00	49.054.523,00	92,12	100,00
	4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00	100,00
	5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	206.758.755,00	205.758.200,00	99,52	100,00
III.	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**52.250.000,00**	**52.250.000,00**	**100,00**	**100,00**
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	52.250.000,00	52.250.000,00	100,00	100,00
IV.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**225.820.000,00**	**213.581.067,00**	**94,58**	**100,00**
	1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	225.820.000,00	213.581.067,00	94,58	100,00
V.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**32.738.600,00**	**32.738.600,00**	**100,00**	**100,00**
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00
	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	32.168.600,00	32.168.600,00	100,00	100,00

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		
			KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
VI.	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**492.313.685,-**	**484.472.594,-**	**98,41**	**100,00**
	1. Penyusunan bahan media informasi Penanaman Modal	99.665.000,-	96.635.000,-	99,97	100,00
	2. Penyelenggaraan pameran investasi	256.858.900,-	249.837.594,-	97,27	100,00
	3. Pengelolaan Aplikasi dan publikasi informasi Promosi	138.789.785,-	38.000.000,-	99,43	100,00
VII.	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**318.889.100**,-	**266.647.100**,-	**83,62**	**90,59**
	1. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal	4.749.000,-	4.749.000,-	100,00	100,00
	2. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	102.890.100,-	102.623.100,-	99,74	100,00
	3. Kajian kebijakan Penanaman Modal dan pemberian insentiv investasi	161.250.000,-	159.275.000,-	98,78	100,00
	4. Pembinaan dan pengembangan BUMD	50.000.000,-		0,00	40,00
VIII.	**Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan**	**141.776.750,-**	**105.356.000,-**	**74,31**	**100,00**
	1. Peningkatan pelayanan periznan usaha	45.150.000,-	23.100.000,-	51,16	100,00
	2. Peningkatan pelayanan perizinan tertentu dan non perizinan	52.505.000,-	38.755.000,-	73,81	100,00
	3. Pelayanan informasi dan pengaduan perizinan	44.121.750,-	43.501.000,-	98,59	100,00
IX.	**Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal**	**52.185.200,-**	**51.185.200,-**	**98,08**	**100,00**
	1. Pengumpulan dan Pengolahan data	9.790.100,-	9.790.100,-	100,00	100,00
	2. Pembinaan Penanaman Modal	25.515.000,-	24.515.000,-	96,08	100,00
	3. Pemantauan, pengawasan penanaman modal dan perizinan	16.880.100,-	16.880.100,-	100,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas dari 9 program, 1 program yang serapanya rendah yakni Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang serapanya hanya 74,31 %, Salah satu penyebab rendahnya capaian adalah diakibatkan oleh terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/6491/SJ tanggal 17 Juli 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah, maka Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), tidak lagi diterbitkan dan dipersyaratkan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

untuk mencapai sasarannya didukung melalui beberapa Kegiatan sebagai berikut :

d. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah Perizinan Usaha yang dapat disetujui melalui Online Single Submission (OSS) dan Non Online Single Submission (OSS). Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mendukung kegiatan tersebut yaitu :

3. Memberikan Fasilitas Loket layanan pendampingan dan layanan mandiri dalam pelaksanaan Permohonan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) bagi Masyarakat ataupun Pelaku Usaha di Daerah;
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis PTSP dari Dinas Teknis terkait dalam hal penyesuaian Satandar Operasional Prosedur terutama melalui Online Single Submission (OSS). *(terlampir Dokumentasi)*

e. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah jumlah Perizinan Tertentu dan Non Perizinan yang dapat disetujui melalui Online Single Submission (OSS) dan Non Online Single Submission (OSS). Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mendukung kegiatan tersebut yaitu :

3. Memberikan layanan Perizinan melalui Aplikasi Online untuk mempermudah masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh legalitas perizinan, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
4. Melaksanakan Penagihan terhadap Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah didampingi oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SatpoPP), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tertib mengurus IMB. *(terlampir Dokumentasi)*

f. Kegiatan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan

Kegiatan ini mencakup Indikator Kinerja yaitu dengan terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan ditanganinya jumlah pengaduan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini dicapai melalui langkah – langkah sebagai berikut :

3. Melakukan Penyebaran Kuisioner kepada Masyarakat atau Pelaku Usaha terkait proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 2 (dua) Kali pelaksanaan, untuk mengukur SKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

4. Memberikan penanganan pangaduan secara cepat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan, baik melalui Website Aplikasi Perizinan Online, Email, Telp/sms, Kotak Saran/Pengaduan dan Formulir atau Surat tertulis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, juga melakukan beberapa perbaikan guna mendukung Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Peningkatan Standar Pelayanan dari segi Sarana, Prasarana dan atau fasilitas, peralatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayananan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan, sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga Pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Ombudsman RI. Pada Tahun 2019, Ruang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan perubahan desain dengan penambahan beberapa fasilitas sebagai berikut :

7. Terdapat Penyekatan antara Front Office (FO) dan Back Office (BO) dalam proses pelayanan perizinan;
8. Terdapat Loket Informasi dan Loket Layanan Perizinan;
9. Terdapat Ruang Tunggu yang dilengkapi dengan AC, TV serta Papan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang memudahkan Masyarakat dan pelaku usaha memperoleh informasi;
10. Terdapat Ruang ibu menyusui / Laktasi;
11. Terdapat Ruang Bermain Anak;
12. Terdapat Fasilitas jalan bagi disabilitas.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2019, di atas maka dapat disimpulkan secara umum bahwa Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2019 telah sesuai dengan target indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan dengan indikator kinerja yakni ***indikator Kinerja Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan Perizinan dan Non* perizinan** menunjukkan capaian kinerja sasaran sebesar **99,90%** atau **Sangat Tinggi**;
2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Indikator Kinerja ***Realisasi Investasi PMA dan PMDN*** yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2019 sebesar **93,99 %** dengan kategori Skala Nilai Peringkat Kinerja **Sangat Tinggi**;
3. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap program dan kegiatan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2019, menunjukkan kinerja rata-rata Baik;
4. Capaian kinerja pemungutan retribusi perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan capaian kinerja hanya sebesar 18,94% atau hanya sebesar Rp. 1.273.156.125,52 dari target sebesar Rp. 6.719.625.500,- ;
5. Capaian kinerja relaisasi anggaran program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2019 menunjukkan capaian kinerja sebesar **92,81%** (Sangat Tinggi) dengan realisasi sebesar Rp. 2.462.693.059,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.653.352.000,-

Meskipun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap target sasaran strategis dan target indikator Tahun 2019 yang tercantum dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

dapat dikatakan sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya atau Sangat Tinggi tetapi masih ada permasalahan terhadap pencapaian target indikator kinerja, Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1) Kurang maksimalnya Perusahaan baik PMA/ PMDN dalam melaksanakan pelaporan LKPM secara online
2) Kurangnya support jaringan internet untuk pelayanan Perizinan (diperlukan sebesar 10 MBps output dan input, sedangkan saat ini baru tersedia 0,25 MBps);
3) Masih kurangnya anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang peningkatan pelayanan publik sesuai standard dari Kemenpan RB, diantaranya belum tersedianya smookingroom, toilet tamu dan sapras untuk disabilitas (jalur disabilitas dan kursi roda)
4) Kurangnya jumlah SDM dan tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja Bidang Penanaman Modal dan PTSP, misalnya ahli komputer, ahli dalam bidang pengelolaan database dan lain-lain.

4.2. Solusi atas permasalahan

Beberapa solusi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat atas beberapa permasalahan tersebut, antara lain:

1) Meningkatkan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan pada Perusahaan baik PMA maupun PMDN.
2) Koordinasi dengan Diskominfo untuk peningkatan/ penguatan jaringan internet guna mensupport pelayanan Perizinan.
3) Meningkatakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sesuai standar
4) Melaksanakan pengembangan aplikasi sacara bertahap guna meningkatkan informasi Promosi dan sistem informasi pelayanan.
5) Menambah jumlah personel/pegawai guna peningkatan pelayanan.
6) Mengirimkan/ mengikutsertakan secara bertahap Pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pendidikan dan pelatihan teknis yang dapat meningkatkan kompetensi kinerja pegawai.

Demikian hasil penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019, semoga bermanfaat bagi semua komponen yang berkontribusi atas pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dapat digunakan sebagai pemicu untuk mencapai target kinerja di tahun anggaran berikutnya.

Pangkalan Bun, April 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. ENCEP HIDAYAT, M.A.P
NIP. 19610606 198603 1 028